

IMPLEMENTASI KURIKULUM BEBASIS KESETARAAN GENDER^{*)}

Oleh: Anik Ghufron^{**)}

Pendahuluan

Kurikulum dikatakan efektif manakala kurikulum tersebut dapat diimplementasikan dan semua peserta didik mampu mengikutinya tanpa diskriminatif. Kalau pada saat ini masyarakat sangat berharap agar semua peserta didik mampu mengakses mata pelajaran dan proses pembelajaran, maka sudah semestinya apabila kurikulum yang berlaku di sekolah perlu ditata dan dioptimalkan untuk memenuhi kehendak masyarakat tersebut. Hal ini penting diupayakan mengingat kurikulum merupakan jantungnya aktivitas pendidikan.

Apa yang dilakukan bangsa Indonesia sejak merdeka, sesungguhnya, telah mengembangkan dan menerapkan desain kurikulum yang diarahkan pada perluasan akses yaitu semua peserta didik berkesempatan yang sama dalam mengikuti dan memperoleh sejumlah pengalaman belajar secara optimal atas dasar azas kemanusiaan dan berkeadilan. Lantaran masih adanya ketidakjelasan arah atau orientasi makna akses tersebut maka implementasi kurikulum yang berlaku menjadi mandul dan tidak mampu mencapai sasaran. Apalagi ada kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpotensi bias jender. Misalnya, pembagian tugas belajar atas dasar perbedaan jenis kelamin.

Mengapa kasus-kasus tersebut di atas terjadi, padahal Pemerintah (Depdiknas) telah berusaha secara maksimal melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan kurikulum secara terus menerus? Menurut hemat saya ada tiga faktor penyebabnya yaitu kualitas desain kurikulum yang belum mantap, masih rendahnya kompetensi guru, dan kebijakan pemerintah yang belum integral.

Pertama, kualitas desain kurikulum yang belum mantap. Implementasi kurikulum tak bisa dilepaskan dari kualitas desain kurikulum yang digunakan. Artinya, jika desain kurikulum belum mantap, baik dari sisi substansi maupun metodologi tentu berpengaruh terhadap kualitas implementasinya di kelas. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang menyertai implementasi kurikulum tak akan berarti apa-apa jika konstruk desain kurikulum belum mantap. Pemberlakuan peraturan Mendiknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2005 tak

^{*)} Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Gender dalam Pendidikan Formal", Hima Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tanggal 17 Desember 2009.

^{**)} Penulis dosen FIP Universitas Negeri Yogyakarta

akan memberi kontribusi yang signifikan bagi implementasi KTSP manakala KTSP secara konsep masih dipersoalkan.

Kedua, masih rendahnya kompetensi guru. Kompetensi guru sangat berpengaruh bagi kualitas implementasi kurikulum. Sukmadinata (1988) mengatakan “implementasi kurikulum hampir semuanya ditentukan oleh kreativitas, kecakapan, dan ketekunan guru. Kurikulum yang sama akan diterima oleh peserta didik secara berbeda karena kemampuan guru dalam mengajar yang berbeda.

Dalam konteks ini dikenal adanya “*teacher curriculum*” dan “*official curriculum*”. *Teacher curriculum* adalah kurikulum yang melekat pada diri guru sewaktu mengajar. Sementara itu, *official curriculum* merupakan kurikulum sesuai dengan silabus sebagai pedoman pembelajaran.

Di antara kedua fenomena di atas, mana yang dominan? Tampaknya *teacher curriculum* yang lebih dominan daripada “*official curriculum*”. Kondisi ini mudah sekali kita temui di kelas atau di sekolah. Misalnya, guru kurang dan bahkan tidak mengacu pada silabus dan RPP ketika memberikan materi kepada peserta didik dalam pembelajaran. Apa yang diberikan tak lebih dari apa yang mereka ketahui atau memberikan sesuatu sebagaimana dulu diterima dari guru-gurunya. Guru tidak mampu memunculkan inovasi dalam implementasi kurikulum, yang sebenarnya, terkandung di dalam rancangan kurikulum.

Dalam pertemuan *Seventh E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All* yang berlangsung di Nusa Dua Bali, 10 – 12 Maret 2008 (Kompas, 10 Maret 2008) terungkap bahwa persoalan masih rendahnya kualitas guru di Indonesia ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan guru, di mana hanya sepertiga guru berlakang belakang pendidikan setara sarjana. Padahal, kita tahu bahwa implementasi kurikulum di sekolah tak sekedar *transfer of knowledge*, tetapi diperlukan strategi kognitif yang kompleks, kematangan emosional, dan pengendalian diri yang mantap.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang belum integral. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan melalui institusi BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) telah terumuskan berbagai standar. Namun demikian, belum semua kebijakan dapat diwujudkan secara maksimal.

Mengapa kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama kebijakan di bidang pendidikan belum dapat diimplementasikan secara maksimal? Setidak-tidaknya ada dua faktor penyebabnya, yaitu:

Pertama, kebijakan pendidikan yang baru saja dirumuskan mendesak segera dilaksanakan dan seringkali diterima dengan penuh keraguan. Rogers (1995: 1) mengatakan

".... common problem of many individuals and organizations is how to speed up the rate of diffusion of an innovation". Kita menyadari bahwa kebijakan yang baru saja diberlakukan akan direspon dengan penuh keraguan dan ketidakpastian oleh para calon pemakainya. Namun, jika kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu dalam waktu yang relatif lama dimungkinkan para pelaku di lapangan tak ragu dalam bekerja. Misalnya, guru masih mengalami keraguan dan ketidakpastian guru tentang KTSP mungkin ada kaitannya dengan kurangnya sosialisasi dan terbatasnya perangkat aturan pelaksanaan KTSP di lapangan.

Kedua, pada umumnya produk kebijakan belum disertai petunjuk teknis atau pelaksanaan di lapangan secara memadai, yang menyebabkan terjadinya putus mata rantai antara dimensi konseptual kebijakan dengan dimensi operasionalnya. Misalnya, diterapkannya kebijakan desentralisasi dalam manajemen pendidikan memiliki konsekuensi terhadap posisi guru sebagai pengembang KTSP. Namun, karena belum atau tidak jelasnya implementasi kebijakan tersebut menyebabkan masih ada guru yang lebih diperlakukan sebagai pelaksana daripada sebagai pengembang kurikulum di tingkat sekolah atau kelas.

Pada kondisi seperti itu, yang ada dalam diri guru adalah menunggu dan mencari contoh-contoh hasil pengembangan KTSP yang benar dari teman guru atau sekolah yang sejenis, padahal yang demikian itu tak mungkin terjadi. Oleh karena itu, agar diperoleh kualitas implementasi KTSP yang memadai maka para guru dituntut terlebih dahulu memahami konsepnya. Rogers (1995: 165) mengatakan "*the individual wishes to understanding the innovation, and to give meaning to it*".

Bagaimana implementasi kurikulum yang diasumsikan mampu memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan peserta didik? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender. Mengapa demikian? Implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender memungkinkan semua peserta didik berkesempatan berkembang potensinya secara optimal tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Smith (Colin J. Marsh (2009: 265) mengatakan; "*...not only do schools provide a gendered experience for students, they also provide a gendered experience for teachers*".

Dengan demikian, implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender memungkinkan peserta didik mampu mengadaptasikan berbagai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

Implementasi Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender

Apa yang dimaksud dengan implementasi kurikulum? Beauchamp (1975: 164) mengartikan implementasi kurikulum sebagai *"a process of putting the curriculum to work"*. Leithwood (Miller dan Seller, 1985: 246) mengatakan *"implementation is a process of behavioral change, in directions suggested by the innovation, occurring in stages, over time, if obstacles to such growth are overcome"*. Menurut Saylor, dkk (1981: 256); *"instruction is thus the implementation of the curriculum plan, usually, but not necessarily, involving teaching in the sense of student-teacher interaction in an educational setting"*. Ketiga pengertian di atas menekankan makna implementasi kurikulum sebagai upaya konkretisasi apa-apa yang terkandung pada kurikulum tertulis ke dalam bentuk aktivitas instruksional di kelas.

Dalam pandangan Miller dan Seller (1985: 246) ada tiga pendekatan untuk memaknai kata implementasi, yaitu implementasi sebagai *"an event"*, *the process of interaction between the curriculum developers and teachers*, dan *"a separate component in the curriculum cycle"*. Dalam kesempatan lain, Miller dan Seller (1985: 247) mengatakan; *"...we define implementation as a process that leads to the shared ownership of innovation. During this process, change will likely occur in an interactive way both in the teacher and in the innovation"*. Di sini, implementasi kurikulum lebih diartikan sebagai bagian dari kegiatan inovasi, perubahan, dan pengejawantahan pengalaman belajar kepada peserta didik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sesungguhnya, implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) ke dalam bentuk kegiatan nyata di kelas, yaitu melakukan proses *transmisi* dan *transformasi* segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Di samping itu, hal penting yang perlu diperhatikan bahwa di dalam implementasi kurikulum terkandung makna inovasi, yaitu mengenalkan dan/atau mewujudkan hal-hal baru dari silabus atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan memodifikasinya ke dalam situasi nyata di kelas.

Implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Hasan (2000: 1) mengatakan "... jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis". Bisa jadi, dua orang guru yang sama-sama mengimplementasikan sebuah kurikulum (misal, kurikulum mata pelajaran Matematika) akan diterima atau dikuasai peserta didik secara berbeda bukan karena isi atau aspek-aspek kurikulumnya yang berbeda, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan dalam implementasi kurikulum yang diupayakan guru.

Keterlaksanaan suatu kurikulum, misalnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bukan sekedar diukur dari telah tersedia dan dikembangkannya silabus oleh pihak sekolah yang disepakati komite sekolah, tetapi lebih dari itu yaitu “seberapa jauh aktivitas pembelajaran di sekolah atau kelas telah berciri KTSP, yaitu mengarah peserta didik menguasai kompetensi sebagaimana yang terumuskan di dalam silabus atau rancangan pelaksanaan pembelajaran”. Di dalam implementasi kurikulum terjadi proses pengejawantahan pengalaman belajar kepada peserta didik. Ornstein dan Hunkins (2004: 298) mengatakan “*successful implementation is a process that should have some novelty*”. Dengan demikian, ada kaitan erat antara kurikulum dengan pembelajaran, yang pola hubungannya seringkali diibaratkan sebagai dua sisi dari mata uang.

Begitu strategisnya posisi implementasi bagi terwujud atau tidaknya sebuah kurikulum, sangatlah tepat jika implementasi kurikulum perlu dilakukan secara dinamis menyesuaikan dengan desain kurikulum dan kemungkinan keterlaksanaannya di sekolah atau kelas. Hal ini sesuai pendapat Ornstein dan Hunkins (2004: 304 - 305) bahwa “... *for curriculum change to be successfully implemented, either slowly or rapidly, five guidelines should be followed to help avoid mistakes of the past. ... (1) innovations designed to improve student achievement must be technically sound, (2) successful innovation requires change in the structure of traditional school, (3) innovation must be manageable and feasible for the average teacher, (4) implementation of successful change efforts must be organic rather than bureaucratic, (5) avoid the ‘do something, do anything’ syndrome*”. Hasan (2000: 1) juga menyarankan agar terlebih dahulu memahami secara tepat tentang filsafat dan teori yang digunakan.

Bagaimana dengan implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender? Implementasi berbasis kesetaraan gender adalah model implementasi kurikulum yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi dalam memperoleh pengalaman belajar sebagaimana yang tertera dalam kurikulum yang berlaku. Semua peserta didik diberi hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian yang sama dalam proses pembelajaran.

Ciri-ciri implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender, antara lain: *pertama*, semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pengalaman belajar sebagaimana yang tertera dalam kurikulum yang berlaku; *kedua*, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber dan tidak bias gender; dan *ketiga*, menekankan pada partisipasi yang sama semua peserta didik dalam proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya, implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender dipandang relevan diterapkan dalam kurikulum yang berlaku pada saat ini, yaitu KTSP. Model implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender sesuai dengan hakekat proses pendidikan yang memanusiakan peserta didik. Proses pendidikan merupakan proses pengembangan segenap potensi peserta didik.

Bagaimana realisasinya di sekolah? Apabila kita sepakat bahwa model implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender sebagai alternatifnya, hal ini bukan berarti bahwa desain kurikulum yang ada dianggap tidak berlaku sama sekali. Di sini, diperlukan adanya berbagai modifikasi atas berbagai komponen kurikulum, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajarannya di sekolah. Pola pengembangannya bersifat *integrated*.

Dua pola penerapan model implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender. *Pertama*, mengembangkan desain kurikulum (silabus dan RPP) dengan berwawasan kesetaraan gender. Artinya, aspek-aspek kurikulum yang terkait dalam desain kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kesetaraan gender, misalnya; pengembangan materi pembelajaran tak diskriminatif.

Kedua, menggunakan berbagai model pembelajaran berbasis kesetaraan gender dalam implementasi kurikulum yang sedang berjalan. Di sini, yang perlu ditekankan adalah memberi kesempatan yang sama semua peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar di sekolah sehari-hari. Model-model pembelajaran berbasis budaya yang bisa digunakan adalah model pembelajaran pemecahan masalah, model pembelajaran inkuiri, model pembelajaran kontekstual, dan lain-lain.

Penutup

Implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender dapat dilakukan di sekolah sehari-hari. Dengan model implementasi ini diharapkan semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran tanpa diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin. Pola pelaksanaannya dapat terjadi sejak pengembangan silabus dan RPP. Demikian pula, dapat terjadi sewaktu proses pembelajaran dengan memberi kesempatan yang sama semua peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar.

Daftar Pustaka

- Anik Ghufron. 2007. “”Profil tingkat keinovasian guru dalam implementasi KTSP”. *Laporan penelitian*. Yogyakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anonimous. 2005. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Beauchamp, G. 1975. *Curriculum theory*. Willmette, Illionis: The Kagg Press.
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hasan, S.H., 2000. “Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat”. Makalah seminar nasional pengembangan program pendidikan berbasis kewilayahan menyongsong diterapkannya otonomi daerah, 31 Agustus 2000 di UPI, Bandung.
- Longstreet, W. S & Shane H.G., (1993). *Curriculum for a new millenium*. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Miller dan Seller. 1985. *Curriculum; perspectives and practice*. New York: Longman.
- Ornstein A.C., & Hunkins F.P., 2004. *Curriculum: foundations, principles, and issues. Fourth edition*. New York: Pearson education, Inc.
- Rogers. EM. 1995. *Diffusion of innovations. Fourth edition*. New York: The Free Press.
- Saylor J.G., Alexander W.M., dan Lewis J.A., 1981. *Curriculum planning for better teaching and learning. Fourth Edition*. Japan: Holt, Rinehart and Winston.
- Sukmadinata, N.S., 1988. Prinsip dan landasan pengembangan kurikulum. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdikbud.